

**Analisis Situasi Pendidikan di Wilayah  
Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi di  
Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas  
Hulu Kalimantan Barat**

Rupita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>*Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura*

*Jl. Ahmad Yani, Kota Pontianak, Indonesia*

Email: [rupita\\_iin@yahoo.com](mailto:rupita_iin@yahoo.com) Phone: 085245177888

English Title: Analysis of the situation of education in Indonesia-Malaysia border region (Studies in Puring Kencana, Kapuas Hulu Regency, West Kalimantan)

---

**Abstract** The education situation in the border area of Puring Kencana require attention for the parties concerned, either in the local or central level. Conducting quality education in order to improve the quality of human resources is still a mere chimera. The condition of the education of children living in the border area of Puring Kencana is still very alarming when compared with education that exist in other border regions in Kapuas Hulu. Education in the border areas of Puring Kencana not have bulding of high school, so children who come from this area there is a select school in Serawak, Malaysia. Educational facilities and infrastructure is still very minimal. This research uses qualitative research methods. Exploration carried out in the border region of Puring Kencana. An overview of the educational problems in the border region of Puring Kencana retrieved directly by asking to local people about the problems of education. The findings of this research show that the expansion of public access at the border of Puring Kencana get the expansion of secondary education is still not affordable. Then, the strategy of Education development policy in the border region of Kencana Puring should be comfirm to the data that complies with the conditions of education in the border to draw up proper education model of development in the region the border.

**Keywords:** the Situation of Education; Border Region; Puring Kencana

**Abstrak** Situasi pendidikan di kawasan perbatasan Puring Kencana membutuhkan perhatian khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu di tingkat pusat maupun lokal. Penyelenggaraan pendidikan bermutu dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih menjadi angan semata. Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Puring Kencana masih sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan yang ada di wilayah perbatasan lainnya di Kapuas Hulu. Pendidikan di kawasan perbatasan Puring Kencana tidak memiliki bangunan sekolah menengah atas, sehingga anak-anak yang berasal

dari wilayah ini ada yang memilih sekolah di Serawak, Malaysia. Sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Eksplorasi dilakukan di wilayah Perbatasan Puring Kencana. Gambaran umum permasalahan pendidikan di wilayah Perbatasan Puring Kencana diperoleh langsung dengan menanyakan kepada masyarakat setempat mengenai permasalahan pendidikan yang mereka hadapi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perluasan akses masyarakat di Perbatasan Puring Kencana mendapatkan perluasan pendidikan menengah masih belum terjangkau. Kemudian, strategi Kebijakan Pembangunan Pendidikan di Wilayah Perbatasan Puring Kencana semestinya mengkonfirmasi kembali data yang sesuai dengan kondisi pendidikan di perbatasan untuk menyusun model pembangunan pendidikan yang tepat di wilayah perbatasan tersebut.

**Kata Kunci:** Situasi Pendidikan; Perbatasan Negara; Puring Kencana

## PENGANTAR

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang mana Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara, baik berbatasan dengan kawasan darat maupun berbatasan dengan kawasan laut. Pada perbatasan laut, Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara antara lain: Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, India, Palau, Australia, Timor Leste, dan kawasan laut Papua New Guinea (Rangkuti, 2010). Kemudian, pada wilayah darat Indonesia berbatasan langsung dengan negara-negara seperti: Malaysia, Timor Leste, dan kawasan Papua New Guinea. Kawasan perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara-negara lain tersebar pada 12 wilayah propinsi yang ada di Indonesia.

Terdapat sekitar 38 kawasan kabupaten dan kota yang letaknya berada di kawasan perbatasan darat yang secara geografis dan demografis berbatasan langsung dengan negara-negara lain. Berdasarkan perjanjian Lintas Batas antara Indonesia dengan Malaysia tahun 2006, secara keseluruhan disepakati bahwa terdapat 18 pintu batas (*exit and entry point*) di kawasan Kalimantan, dan baru terdapat dua pintu batas resmi yaitu di Entikong Kabupaten Sanggau dan Badau Kabupaten Kapuas Hulu (Zulkifli, 2012). Posisi Kalimantan sangat penting dan strategis karena menjadi pintu gerbang bagi lalu lintas barang dan jasa, serta mobilitas penduduk, baik untuk kepentingan bisnis maupun tenaga kerja antara Indonesia dan Malaysia (Magenda, 1991).

Keberadaan kawasan-kawasan perbatasan membutuhkan perhatian khusus bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik itu di tingkat pusat maupun lokal. Sebagian besar perbatasan darat negara Indonesia dengan negara Malaysia terdapat di kawasan pulau

Kalimantan. Setidaknya terdapat 5 Kabupaten yang ada di Kalimantan Barat berbatasan darat langsung dengan negara Malaysia. Yang mana pada umumnya masyarakat di perbatasan masih dalam keadaan miskin (Niko, 2016). Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kapuas Hulu secara keseluruhan berjumlah 23.960 jiwa atau 9,45 persen dari seluruh jumlah penduduk Kapuas Hulu (Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu, 2018).

### *Perbatasan Negara Sebagai Beranda Terdepan*

Sebagian besar kawasan perbatasan di Indonesia merupakan kawasan tertinggal dengan sarana dan prasarana sosial, ekonomi, dan pendidikan yang sangat terbatas (Warsilah & Wardiat, 2017). Pada tahun 2007 Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menegaskan bahwa terdapat enam permasalahan utama pada wilayah tertinggal, yakni: 1) kualitas sumber daya manusia relatif rendah; 2) kurangnya sarana dan prasana (infrastruktur); 3) terbatasnya akses ekonomi, informasi dan teknologi; 4) terdapatnya gangguan keamanan dan bencana; 5) merupakan daerah perbatasan, terisolir, dan Komunitas Adat Terpencil (KAT) memiliki akses terbatas; dan 6) kebijakan pembangunan yang kurang tepat.

Rangkuti (2010) menyebutkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan masih tertinggal bila dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Jika dibandingkan dengan negara tetangga khususnya Malaysia, kesenjangan terlihat dengan jelas pada berbagai aspek, baik aspek infrastruktur, sosial, maupun ekonomi. Ditinjau dari aspek keamanan, kondisi ini sangatlah rawan, karena wilayah perbatasan merupakan wilayah strategis yang mudah terinfiltrasi secara langsung maupun tidak langsung oleh negara lain, baik secara politik, ekonomi, sosial, maupun kultural.

Beberapa daerah perbatasan terkesan tidak tersentuh oleh dinamika pembangunan, sehingga masyarakatnya pada umumnya miskin dan banyak yang berorientasi kepada negara tetangga. Pada masyarakat Badau di perbatasan Kapuas Hulu, sebagian besar warganya menjadi TKI di Malaysia untuk mendapatkan penghasilan (Warsilah & Wardiat, 2017).

Kebijakan prioritas nasional ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan di perbatasan agar permasalahan perbatasan segera diselesaikan dan tidak menjadi

ancaman bagi kedaulatan NKRI sesuai dengan visi terwujudnya perbatasan negara sebagai wilayah yang aman, tertib, dan maju dengan pendekatan secara komprehensif pada tiga dimensi yaitu kesejahteraan, keamanan dan lingkungan (Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011).

Pada dasarnya wilayah perbatasan di Kalimantan Barat secara umum memerlukan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu meningkatkan kualitas SDM lokal di perbatasan negara. Dengan demikian, peningkatan kualitas SDM ini diharapkan dapat menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut untuk menghasilkan penyelenggaraan pendidikan di daerah perbatasan yang bermutu, jelas diperlukan perhatian dan analisisnya terhadap segenap subsistem atau komponen pendidikan yang ada, di antaranya masukan siswa, sarana-prasarana, ketenagaan, biaya pendidikan, kurikulum, dan hasil belajar. Perlu diketahui bagaimana kondisi dari komponen-komponen tersebut, kemudian dianalisis sejauhmana pengaruh komponen tersebut berpengaruh terhadap hasil belajar siswa yang ada di wilayah perbatasan.

Daerah perbatasan memerlukan sentuhan penyelenggaraan pendidikan bermutu agar mampu berdaya dalam rangka meningkatkan kualitas SDM-nya. Melalui peningkatan kualitas SDM ini menjadi pintu masuk guna meningkatkan taraf dan kesejahteraan hidup masyarakat di daerah perbatasan Kapuas Hulu yang berwawasan dan berkarakter kebangsaan. Dengan kata lain bahwa kualitas SDM masyarakat di perbatasan Kapuas Hulu menjadi titik dalam melihat kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat di wilayah perbatasan.

### *Metode Penelitian*

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penggunaan cara ini didasarkan atas pertimbangan bahwa peneliti berusaha mendapatkan gambaran yang sebenarnya tentang permasalahan pendidikan yang ada di setiap jenjang dan jenis pendidikan pada wilayah Perbatasan di Kapuas Hulu. Kemudian, penelitian ini bersifat eksploratif karena hingga saat ini belum jelas permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh wilayah Perbatasan. Dengan cara mengeksplorasi sekolah-sekolah di Perbatasan yaitu di Kecamatan

Puring Kencana dan Kecamatan Badau, diharapkan dapat memetakan gambaran umum permasalahan pendidikan wilayah Perbatasan Kapuas Hulu Propinsi Kalimantan Barat. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah daftar isian dan wawancara. Wawancara digunakan untuk mengeksplorasi secara umum sarana dan prasarana yang sudah tersedia di sekolah dasar.

## **PEMBAHASAN DAN DISKUSI**

### **Analisis Situasi Pendidikan di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu**

Pembangunan pendidikan kini tidak bisa lagi dikembangkan dalam perspektif ke dalam (*inward looking*), yaitu dalam rangka mendidik manusia agar cerdas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan berkepribadian mulia. Pendidikan mesti berorientasi keluar (*outward looking*), yakni untuk menumbuhkembangkan sistem sosial, ekonomi, dan budaya yang baik di masyarakat (Agung, 2012). Sehingga, proses pendidikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan atau bagian integral dari pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian, pendidikan harus mampu melahirkan SDM yang berkualitas dan tidak menjadi beban pembangunan dan masyarakat, yaitu SDM yang menjadi sumber kekuatan atau sumber penggerak (*driving forces*) bagi seluruh proses pembangunan dan kehidupan masyarakat.

Kemudian, dalam Rencana Induk Pengelolaan Wilayah Perbatasan diharapkan dapat memberikan prinsip-prinsip pengembangan wilayah Perbatasan Negara sesuai dengan karakteristik fungsionalnya untuk mengejar ketertinggalan dari daerah di sekitarnya yang lebih berkembang ataupun untuk mensinergikan dengan perkembangan negara tetangga. Selain itu, kebijakan dan strategi ini nantinya juga ditujukan untuk menjaga atau mengamankan wilayah Perbatasan Negara dari upaya-upaya eksploitasi sumberdaya alam yang berlebihan, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun yang dilakukan dengan dorongan kepentingan negara tetangga, sehingga kegiatan ekonomi dapat dilakukan lebih selektif dan optimal.

Kondisi pendidikan anak-anak yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan Kapuas Hulu masih sangat memprihatinkan apabila dibandingkan dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar.

Pendidikan di kawasan perbatasan Kapuas Hulu hanya mampu menyediakan fasilitas yang jauh dari kata cukup, dengan kata lain bahwa sarana dan prasarana pendidikan masih sangat minim. Bahkan di wilayah Kecamatan Puring Kencana yang merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tidak memiliki bangunan sekolah menengah atas, sehingga anak-anak yang berasal dari wilayah ini ada yang bersekolah di Malaysia.

Berbagai kondisi pendidikan yang ada di sekitar kawasan perbatasan Kapuas Hulu ini kemudian diperparah dengan aksesibilitas menuju ke sekolah yang buruk, sehingga menghambat guru maupun siswa. Mereka harus menyeberangi sungai, melewati hutan-hutan, bahkan pada beberapa wilayah tidak memiliki akses jalan darat untuk menempuh perjalanan menuju ke sekolah. Butuh waktu lama dan tenaga ekstra karena harus melewati medan yang sulit dan jauh. Selain itu, tenaga pengajar juga terbatas karena tidak banyak yang mau mengabdikan diri sebagai guru di daerah perbatasan yang terpencil dengan akses yang sulit serta gaji yang kurang memadai.

Potret buram pendidikan di kawasan perbatasan Kapuas Hulu bukanlah hal yang baru. Pada sebagian besar kawasan perbatasan negara di Kalimantan Barat merupakan wilayah tertinggal, sungguhpun peran wilayah perbatasan dalam konsep kedaulatan negara sangat penting. Beranda terdepan negara seolah-olah menjadi pagar dalam menjaga kedaulatan bangsa dan sekaligus gudang keterbelakangan dalam pembangunan nasional, termasuk bidang pendidikan.

Ketimpangan pendidikan dengan negara tetangga Malaysia merupakan faktor utama penyebab anak-anak usia sekolah lebih memilih untuk menimba ilmu di negara tetangga tersebut. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai, tenaga guru yang berkualitas, biaya pendidikan yang gratis, banyak sekolah yang dilengkapi dengan asrama, termasuk seragam dan buku-buku penunjang sampai jaminan kerja bagi anak-anak Indonesia yang berprestasi. Hal ini menjadi magnet bagi mereka yang berharap untuk memperoleh kehidupan yang jauh lebih baik dan layak.

Kondisi pendidikan di kawasan perbatasan Kapuas Hulu dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, sehingga lebih banyak siswa yang berasal dari perbatasan Kapuas Hulu yang memilih sekolah di negeri Serawak Malaysia daripada sekolah di negeri sendiri. Alasannya sangat relevan dan logis, tidak lain karena sekolah di Malaysia tidak dipungut biaya sampai tamat, sedangkan sekolah di Indonesia masih

dipungut biaya terlebih untuk menunjang sarana dan prasarana sekolah. Kemudian sekolah di Malaysia dilengkapi fasilitas dan sarana prasarana penunjang pendidikan yang sangat baik dan gedung sekolahnya pun jauh lebih bagus dari gedung sekolah di perbatasan Kapuas Hulu.

Atas dasar itulah dalam penanganan masalah perbatasan diperlukan adanya program yang terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait, mulai dari tingkat pusat sampai dengan daerah, dengan memperhatikan segenap aspek yang mempengaruhi seperti kependudukan, lalu lintas barang/perdagangan, kesehatan, keamanan, konservasi sumber daya alam, dan sumberdaya manusia (penyelenggaraan pendidikan). Dalam pergeseran pendekatan dari keamanan ke arah kesejahteraan, jelas sumberdaya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan.

Kualitas sumberdaya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan. Dalam kaitan ini pendidikan memiliki peran penting untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di daerah perbatasan, sekaligus wahana untuk membentuk karakter dan sikap kebangsaan dan kecintaan terhadap tanah air yang tinggi. Kemudian kenyataan sampai saat ini, kesempatan anak-anak di perbatasan Kapuas Hulu untuk memperoleh pendidikan masih sebatas pada tingkat sekolah dasar saja.

Dalam konteks pembangunan pendidikan di kawasan perbatasan Kapuas Hulu sangat memerlukan lebih banyak perhatian dan sentuhan, keadaan demikian dikarenakan letak geografisnya sangat jauh dari ibu kota provinsi dan kabupaten, menjadi alasan mengapa pendidikan di sana kurang perhatian dan sentuhan. Alasan lain adalah belum ada akses jalan darat yang memadai, saluran komunikasi melalui telepon seluler maupun kabel tidak tersedia, dan belum terjangkau aliran listrik (Warsilah & Wardiat, 2017).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dengan tujuan memberikan pendidikan bagi warga negara Indonesia untuk mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri didalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam penyelenggaraannya wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan

formal, pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Pembangunan pada bidang pendidikan merupakan salah satu upaya untuk mencetak sumberdaya manusia yang berkualitas, potensial dan produktif bagi pembangunan, baik melalui pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.

Upaya meningkatkan mutu dunia pendidikan mutlak diperlukan guna menghasilkan sumber daya yang handal dan mandiri, serta mampu dalam menghadapi perkembangan iptek dan tangap serta mampu dalam menghadapi perkembangan iptek dan tangap terhadap perkembangan (Faturrahman, dkk., 2012). Oleh karena itu penyediaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia.

## **SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil kajian ini, maka dapat disimpulkan bahwa Keadaan sarana dan prasarana pendidikan di wilayah perbatasan di Kecamatan Puring Kencana dan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu, relatif cukup baik, namun ada beberapa komponen dari prasarana sekolah yang mengalami kerusakan dan tidak layak. Sarana dan prasarana yang tidak memadai dijumpai di sekolah yang letaknya di wilayah pedalaman dan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di sekolah, perlu dilakukan: Pemetaan standar sarana dan prasarana pendidikan di satuan tingkat dasar; Melakukan rehabilitasi gedung/ruang kelas yang mengalami kerusakan; Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembiayaan sekolah, seperti melalui penguatan komite sekolah dan pelibatan perusahaan setempat melalui CSR; Mensinergikan dan memetakan kebutuhan daerah-daerah desa yang membutuhkan akses sarana dan prasarana dasar sekolah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agung, I. 2012. Kajian Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah Perbatasan. *Jurnal Ilmiah VISI P2TK PAUD NI*. Vol. 7, No. 2 (2012). Hal. 173-184.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kapuas Hulu. 2018. *Kabupaten Kapuas Hulu dalam Angka Tahun 2017*.

- Faturrahman, dkk. 2012. *Pengantar Pendidikan*. Bandung: Prestasi Pustaka.
- Magenda, B. D. (1991). *East Kalimantan; the Decline of A Commercial Aristocracy, Cornell Modern Indonesian Project, Cornell University*. New York: Ithaca.
- Niko, N 2016, Perempuan Pengrajin Bidai di Perbatasan Jagoi Babang, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 3, No. 2, h. 185-190.
- Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025.
- Rangkuti. (2010). *Pengelolaan Perbatasan Ditinjau Dari Sosial, Ekonomi dan Ekologi Menunjang Pertahanan Negara (National Security) dilihat Sudut Pandang Diplomasi*. Jakarta: Selectedworks.
- Warsilah, H. & Wardiat, D. (2017). *Pembangunan Sosial di Wilayah Perbatasan Kapuas Hulu, Kalimantan Barat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulkifli. 2012. *Kerjasama Internasional Sebagai Solusi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Antar Negara (Studi Kasus Indonesia)*. Jakarta: Tesis Fakultas Hukum Universitas Indonesia.